

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PERUMDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 – 2018

Stela Maris Febriana Gea <sup>1)</sup>

Suharno <sup>2)</sup>

Fadjar Harimurti <sup>3)</sup>

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> stelamarisfg@gmail.com

## ABSTRACT

*The government has a responsibility in digging every potential of the area in order to contribute to the acceptance of the local revenue independently. Local revenue can be said to be an influential source of acceptance in an area. If an area can properly compile the local revenue, financial availability to improve, develop, and organize regional autonomy will also be better too. This type of research is a descriptive analysis, with quantitative data types in the form of financial statements obtained from Perumda PAU Pedaringan and office of BPPKAD Surakarta. Data collection techniques using documentation, interviews, and library studies. This research analysis technique uses effectiveness analysis, contribution analysis, and calculation of ROA and ROE. The result of the effectiveness analysis in this study is the level of profit effectiveness Perumda PAU Pedaringan experienced a cycle of fluctuations from 2014 - 2018. The rate of profit contribution Perumda PAU Pedaringan was judges very less since 2014 - 2018. The level of health based on the calculation of ROA and ROE was reduced from 2014 - 2018.*

**Keywords:** *effectiveness, contributions, Perumda PAU Pedaringan Surakarta, local revenue.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan daerahnya masing-masing, seperti peningkatan taraf hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pembangunan, transportasi, serta memperoleh pendapatan lain dari potensi daerah tersebut yang sesuai dengan dasar hukum Negara Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, serta kewajiban daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Otonomi daerah dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan potensi daerahnya sehingga pelayanan yang diberikan kepada daerah dapat menjadi optimal, efektif, dan efisien. Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari PAD, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. PAD dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan yang berpengaruh dalam suatu daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, sehingga peran BUMD melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pemupukan dana bagi pembangunan daerah. Salah satu BUMD kota Surakarta yaitu Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan yang turut berkontribusi dalam penerimaan PAD kota Surakarta. Perumda PAU Pedaringan

merupakan perusahaan pergudangan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis kawasan kota Surakarta dan sekitarnya dengan menyediakan jasa layanan pergudangan terpadu, jasa layanan angkut barang, perdagangan, dan jasa lain/aneka usaha.

Dilansir dalam berita media *online* yaitu solopos.com pada tanggal 18 September 2015 bahwa lahan seluas 11,6 Ha milik Perumda PAU Pedaringan menganggur. Perumda PAU Pedaringan hanya memanfaatkan lahan seluas 3 Ha saja, yaitu seluas 1 Ha untuk layanan pergudangan dan 2 Ha sisanya digunakan untuk layanan parkir. Perumda PAU Pedaringan bekerja sama dengan BUMN yaitu PT. Pos Indonesia untuk mengembangkan usaha logistik pada tahun 2016. Perjalanan perkembangan kinerja, inovasi, dan terobosan yang dilakukan oleh Perumda PAU Pedaringan selama tahun 2014 - 2015 telah membuahkan hasil dengan menerima penghargaan TOP BUMD pada tahun 2016 untuk kategori sektor bisnis yang diberikan oleh majalah *Business News* Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berencana untuk melakukan usaha baru berupa pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pedaringan pada tahun 2019. Rencana ini telah berhasil masuk dalam APBD 2019 sebesar 12 miliar rupiah yang dinilai dapat mencukupi kebutuhan dalam merealisasikan cita-cita Pemkot Surakarta untuk mendorong usaha, komitmen, dan kinerja Perumda PAU Pedaringan agar terus berkontribusi terhadap PAD Kota Surakarta. SPBU Pedaringan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar truk milik PAU Pedaringan sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Peluang bisnis SPBU tersebut dinilai memiliki resiko yang kecil, sehingga tetap mampu bersaing dengan SPBU yang berada dekat dengan lingkungan tersebut. Kemajuan prestasi Perumda PAU Pedaringan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap PAD serta pertumbuhan ekonomi kota Surakarta.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk: 1) menganalisis tingkat efektivitas laba Perumda PAU Pedaringan selama tahun 2014 - 2018 secara keseluruhan. 2) menganalisis tingkat pencapaian Perumda PAU Pedaringan dalam berkontribusi laba pada PAD Kota Surakarta selama tahun 2014 - 2018 secara keseluruhan.

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Otonomi Daerah**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi penjelasan bahwa, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain: a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya, b) meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya, c) meningkatkan daya saing pada setiap daerah, d) meningkatkan daya saing pada setiap daerah.

#### **2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang”. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan pengertian bahwa “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.

#### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerangkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lain menurut Halim (2013: 101) “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

4. Efektivitas

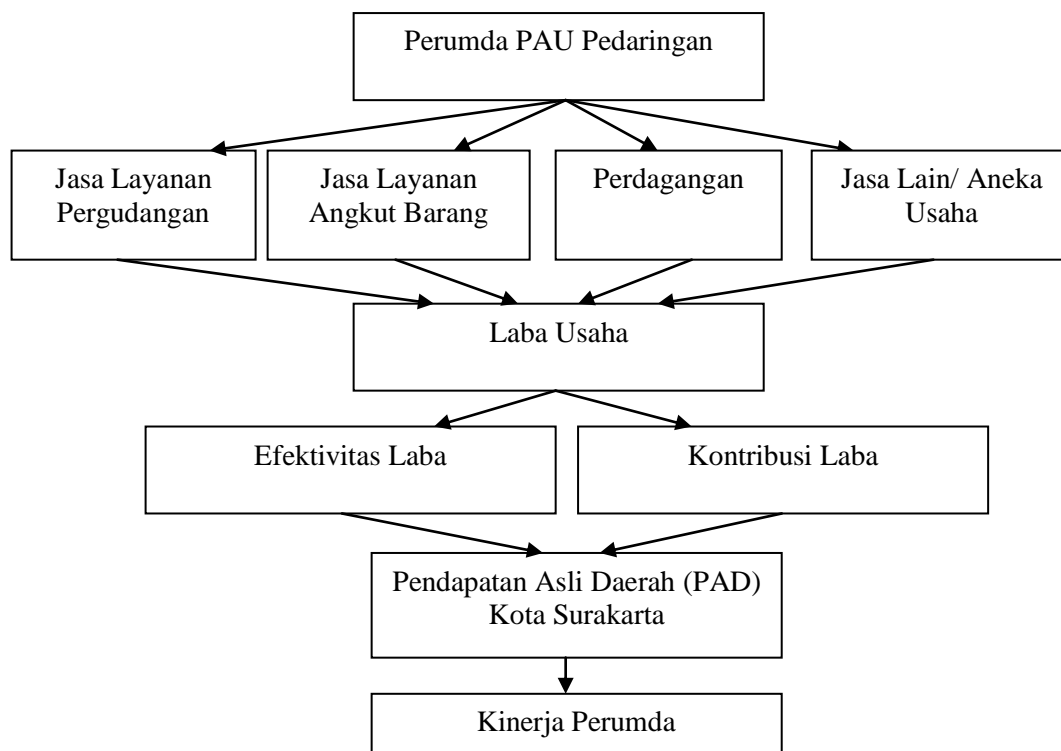
Ravianto dalam Masruri (2014: 11) berpendapat bahwa suatu pekerjaan atau keluaran yang telah dilakukan sudah seperti yang diharapkan dalam mutu, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan perencanaan dapat dikatakan efektif. Sependapat dengan penelitian Maulana dan Rachman (2016) bahwa ”efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit yang mencapai tujuan yang diinginkan”.

5. Kontribusi

Handoko (2013: 3) berpendapat bahwa “Kontribusi adalah suatu besar sumbangsih terhadap suatu hal atau kegiatan yang terlaksana”. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang seperti pemikiran, profesionalisme, finansial atau materi, dan lain-lain.

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa Perumda PAU Pedaringan bergerak dalam menyediakan usaha jasa layanan pergudangan terpadu, jasa layanan angkut barang, perdagangan, dan jasa lain/aneka usaha. Melalui usaha jasa layanan tersebut Perumda PAU Pedaringan memperoleh pendapatan yang nantinya memberikan laba usaha. Laba usaha inilah yang dapat dinilai tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD, sehingga diketahui kinerja Perumda PAU Pedaringan melalui penerimaan PAD Kota Surakarta.

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan secara sistematis dalam bentuk tulisan dengan menyelidiki data kuantitatif dari laporan keuangan berupa tabel penerimaan laba BUMD yang berimplikasi pada pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian yaitu Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan Kota Surakarta.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dengan menggambarkan data yang diperoleh dan dibuktikan berdasarkan angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian target dari Perumda PAU Pedaringan dalam merealisasikan penerimaan labanya. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Laba} = \frac{\text{Realisasi Laba Operasional Perusahaan Daerah}}{\text{Target Laba Perusahaan Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria efektivitas dapat diasumsikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Firdausy, 2017: 91)

#### 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan dalam berbagai bidang seperti pemikiran, profesionalisme, finansial, dan lain-lain. Dalam hal ini Perumda PAU Pedaringan memberikan kontribusi berupa laba usaha kepada PAD Kota Surakarta. Perhitungan kontribusi kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penerimaan laba dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Laba} = \frac{\text{Realisasi Laba Operasional Perusahaan Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria efektivitas dapat diasumsikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Tingkat Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdausy, 2017: 92)

### 3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan daerah dalam periode tertentu yang dapat diukur dengan beberapa indikator berdasarkan basis akrual melalui penerimaan PAD. Melakukan evaluasi seberapa baik Perumda PAU Pedaringan telah menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan baik pada subbagian jasa layanan maupun secara keseluruhannya dapat diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Adapun perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Eduardus, 2010: 372)

Klasifikasi kriteria penetapan peringkat ROA dapat diasumsikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Penetapan Peringkat ROA**

Persentase	Kriteria
>1,5%	Sangat Sehat
1,25% < ROA <1,5%	Sehat
0,5% < ROA <1,25%	Cukup Sehat
0% < ROA <0,5%	Kurang Sehat
ROA < 0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Pengukuran guna mengetahui telah sejauh mana Perumda PAU Pedaringan dapat menghasilkan laba dari pengelolaan modal secara efektif juga perlu dilakukan dengan menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE). Rumus yang dilakukan yaitu membandingkan laba bersih dengan ekuitas, apabila persentase rasio ini semakin tinggi maka semakin baik pula tingkat efektivitas pengelolannya untuk menghasilkan keuntungan. Penggambaran rasio ini yaitu, sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Sumber: (Mujilan, 2012)

Klasifikasi kriteria penetapan peringkat ROA dapat diasumsikan sebagai berikut:

**Tabel 4. Kriteria Penetapan Peringkat ROE**

Persentase	Kriteria
ROE >15%	Sangat Sehat
12,5% < ROE <15%	Sehat
5% < ROE <12,5%	Cukup Sehat
0% < ROE <5%	Kurang Sehat
ROE <0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Efektivitas Laba Keseluruhan Perumda PAU Pedaringan Surakarta Tahun 2014 - 2018

**Tabel 5. Tingkat Efektivitas Laba Keseluruhan**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp 1.100.505.000,00	Rp 1.110.748.983,00	101%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.202.190.000,00	Rp 1.283.789.734,00	107%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.432.515.000,00	Rp 830.528.836,00	58%	Tidak Efektif
2017	Rp 944.503.000,00	Rp 962.651.587,00	102%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.200.500.000,00	Rp 917.249.000,00	76%	Kurang Efektif

Sumber: Pedaringan Surakarta diolah, 2019

Hasil perhitungan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas laba secara keseluruhan oleh Perumda PAU Pedaringan mengalami fluktuasi dari tahun 2014 - 2018.

2. Tingkat Kontribusi Laba Keseluruhan Perumda PAU Pedaringan Surakarta Tahun 2014 - 2018

**Tabel 6. Tingkat Kontribusi Laba Keseluruhan**

Tahun	Realisasi Laba	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	Rp 1.110.748.983,00	Rp 335.660.206.640,82	0,33%	Sangat Kurang
2015	Rp 1.283.789.734,00	Rp 372.798.426.790,07	0,34%	Sangat Kurang
2016	Rp 830.528.836,00	Rp 425.502.779.064,00	0,20%	Sangat Kurang
2017	Rp 962.651.587,00	Rp 527.544.224.970,91	0,18%	Sangat Kurang
2018	Rp 917.249.000,00	Rp 527.739.388.159,00	0,17%	Sangat Kurang

Sumber: Pedaringan Surakarta diolah, 2019

Tahun 2014 - 2018 laba keseluruhan Perumda PAU Pedaringan masuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Surakarta.

3. Perhitungan *Return on Assets* (ROA) Perumda PAU Pedaringan Surakarta tahun 2014 - 2018

**Tabel 7. Perhitungan *Return on Assets* (ROA)**

Tahun	Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak	Total Aset	(%)	Kriteria
2014	Rp 1.110.748.983,00	Rp 6.606.951.582,00	16,8%	Sangat Sehat
2015	Rp 1.283.789.734,00	Rp 11.792.145.379,00	10,9%	Sangat Sehat
2016	Rp 830.528.835,96	Rp 9.437.163.475,00	8,8%	Sangat Sehat
2017	Rp 962.651.586,75	Rp 264.697.524.850,00	0,4%	Kurang Sehat
2018	Rp 932.642.659,74	Rp 269.606.559.463,00	0,3%	Kurang Sehat

Sumber: Pedaringan Surakarta diolah, 2019

Hasil perhitungan dari tingkat kesehatan Perumda PAU Pedaringan melalui tabel di atas dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2014 - 2016 masuk dalam kriteria sangat sehat namun menurun pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan persentasi ROA terjadi akibat dari penurunan pada laba bersih yang diperoleh Perumda PAU Pedaringan disertai dengan total aset yang terus meningkat dari tahun 2014 - 2018.

#### 4. Perhitungan *Return on Equity* (ROE) Perumda PAU Pedaringan Surakarta tahun 2014 - 2018

**Tabel 8. Perhitungan *Return on Equity* (ROE)**

Tahun	Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak	Total Ekuitas	(%)	Kriteria
2014	Rp 1.110.748.983,00	Rp 4.072.322.793,00	27,3%	Sangat Sehat
2015	Rp 1.283.789.734,00	Rp 8.578.588.240,00	15%	Sehat
2016	Rp 830.528.835,96	Rp 8.505.614.262,00	9,8%	Cukup Sehat
2017	Rp 962.651.586,75	Rp 263.844.997.883,00	0,4%	Kurang Sehat
2018	Rp 932.642.659,74	Rp 265.251.314.750,00	0,4%	Kurang Sehat

Sumber: Pedaringan Surakarta diolah, 2019

Hasil perhitungan ROE dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemampuan Perumda PAU Pedaringan dalam pengelolaan ekuitas yang dimiliki mengalami penurunan sejak tahun 2014 menuju 2018. Penurunan persentase ROE terjadi akibat dari penurunan pada laba bersih yang diperoleh Perumda PAU Pedaringan disertai dengan total ekuitas yang terus meningkat dari tahun 2014 - 2018.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tingkat efektivitas laba dan tingkat kontribusi laba Perumda PAU Pedaringan Surakarta terhadap PAD Kota Surakarta yaitu tingkat efektivitas laba secara keseluruhan oleh Perumda PAU Pedaringan terhadap PAD mengalami fluktuasi namun terhitung selama tahun 2014 – 2018 rata-rata tergolong efektif. Tingkat kontribusi laba secara keseluruhan oleh Perumda PAU Pedaringan terhadap PAD selama tahun 2014 – 2018 dinilai sangat kurang berkontribusi. Perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rasio ROA dan ROE menunjukkan hasil tingkat kesehatan yang selalu menurun dari tahun 2014 – 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, Carunia M. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Handoko. 2013. *Manajemen*. Edisi kedua. Cetakan ketigabelas. BPFE. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Akademia Permata. Padang.
- Maulana, M dan Rachman B. 2016. “Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog”. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 9, No. 4, hlm. 331-347.
- Mujilan. 2012. *Analisis Laporan Keuangan dan Rasio Keuangan*. Prodi Akuntansi Universitas Widya Mandala. Madiun.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama. Kanisius. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962*. Tentang Perusahaan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- <http://old.solopos.com/2015/09/18/aset-daerah-lahan-116-ha-milik-ppk-pedaringan-ngganggur-643715> diakses tanggal 21 Oktober 2018.
- <http://pedaringan.com/id/> diakses tanggal 21 Oktober 2018.
- <http://surakarta.go.id/?p=3703> diakses tanggal 21 Oktober 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 24 Maret 2019.